

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boven Digoel masih akan menghadapi banyak kendala. Kelembagaan usaha Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam mengatasi permasalahan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Perlu digaris bawahi bahwa pelaku usaha UMKM dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang kurang memadai.

Upaya pemberdayaan UMKM semakin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah terisolir dan jauh dari pusat kota. Lemahnya kelembagaan juga terjadi pada Koperasi karena minimnya pemahaman perkoperasian oleh para pengawas, pengelola, pengurus maupun anggota koperasi. Hal ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi tetapi juga rendahnya kualitas SDM dalam mengelola koperasi hal ini dapat dilihat dari rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan oleh koperasi aktif. Semakin buruknya citra koperasi ditengah masyarakat, karena banyak koperasi yang tidak aktif dengan legalitas yang kurang memadai, terlilit berbagai persoalan hukum bahkan keberadaan pengurus, anggota, akte pendirian serta alamat kantor sering berpindah-pindah.

Masalah lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama adalah terhadap bahan baku, sumber permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.

Dalam hal modal memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan seringkali koperasi dan UMKM terjerat ulah rentenir dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Boven Digoel serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA“

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan kabupaten Boven Digoel dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aman

Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Untuk membangun wilayah perbatasan yang kokoh, pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus menyediakan pelayanan publik yang memenuhi standar keamanan, komitmen yang kuat, kecukupan anggaran serta sumber daya manusia yang handal agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat merasakan langsung pembangunan nasional.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam membangun wilayah perbatasan yang kokoh. Pertama aspek geografi, dimana Kabupaten Boven Digoel masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik. Aspek kedua, adalah demografis, dimana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan dapat meningkatkan kriminalitas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus waspada terhadap paham maupun budaya asing yang rentan dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan. Dari sisi keamanan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik.

b. Damai

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia, permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dimasyarakat.

Perdamaian menjadi keinginan di semua daerah, terutama di daerah perbatasan. Perdamaian di wilayah perbatasan harus menjadi keinginan dan komitmen setiap orang dan seluruh elemen masyarakat. Perdamaian di perbatasan pun harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat, demi terciptanya wilayah yang aman tanpa konflik dan hidup dalam persaudaraan dengan berbagai keragaman yang ada.

c. Adil

Masyarakat adil makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia, suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia telah berhasil mencapai keadilan dan kemakmuran. Semua rakyat tanpa pengecualian mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, rakyat sejahtera, serba kecukupan, serta tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui berbagai macam strategi dan program pemerintah, Boven Digoel diharapkan berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimiliki. Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan selalu digalakkan. Perwujudan pemerataan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lainnya selalu menjadi topik besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya.

d. Bersatu

Boven Digoel merupakan kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya. Keragaman ini sering kali menjadi akar timbulnya konflik antarsuku, ras dan agama. Untuk mengatasi munculnya hambatan, seluruh masyarakat, pihak swasta, dan Pemerintah atau *stakeholder* Kabupaten Boven Digoel harus mengalahkan ego masing-masing, serta bersatu padu untuk meningkatkan kepedulian agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Boven Digoel. Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat agar mempererat persatuan untuk membangun daerahnya agar lebih maju dan sejahtera.

e. Sejahtera

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat

Kabupaten Boven Digoel, dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

f. Berdaya Saing

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui elemen ini, pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing.

Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Kabupaten Boven Digoel.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Misi pertama: Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor SDM, baik

secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga negara suatu bangsa khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yg memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa pendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya. Dengan beragamnya ras, etnis, dan agama yang berbeda di Boven Digoel diharapkan pengembangan SDM di Kabupaten Boven Digoel dilakukan lintas etnis, artinya semua etnis bisa memperoleh pendidikan yang sama di Boven Digoel, serta lintas wilayah, artinya pendidikan merata di semua wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Boven Digoel lintas etnis dan lintas wilayah menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

2. Misi kedua; Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan;

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, perlu memerhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat serta sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Boven Digoel ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel serta kemampuan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

3. Misi ketiga; Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Salah satu tujuan dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat Boven Digoel kebanyakan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasainya, berbasis pada sektor pertanian yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengembangan potensi pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di Boven Digoel dengan segala tantangan yang harus dihadapi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, diharapkan mampu memecahkan persoalan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan membangun ketahanan pangan. Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Maka dari itu, pengembangan potensi pertanian di Boven Digoel juga diikuti dengan memerhatikan kesejahteraan petani.

4. Misi keempat; Membangun infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan ruang

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama pada permukiman-permukiman yang terisolasi. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan hubungan antar tempat sehingga memungkinkan mobilitas faktor produksi, barang dan jasa secara efektif dan efisien. Infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kabupaten Boven Digoel sangat penting mengingat kondisi medan yang berat.

Sesuai dengan kondisi medan, moda transportasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang adalah moda transportasi udara dan sungai. Namun demikian, dukungan moda transportasi darat juga sangat dibutuhkan terutama untuk hubungan antar distrik atau antar permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pembangunan ekonomi dalam wilayah dan peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi ke luar wilayah dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara, peningkatan dan pemeliharaan

prasarana jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan pos dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

5. Misi kelima; Peningkatan stabilitas wilayah kawasan perbatasan

Indonesia merupakan negara plural yang menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam dan budaya yang berlimpah. Namun, banyak ancaman dan gangguan yang membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia terganggu sehingga dibutuhkan perwujudan wilayah pertahanan negara yang kuat. Upaya pembentukan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan kekuatan pertahanan di Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan pertahanan negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Papua Nugini. Daerah pangkal perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun lawan, terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut.

6. Misi keenam; Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan prestasi olahraga

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanyamenitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Seperti yang telah kita ketahui, wilayah Kabupaten Boven Digoel kaya akan ras dan etnis yang beranekaragam. Pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Boven Digoel diharapkan dilakukan dengan sepenuh hati tanpa membedakan ras dan etnis. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan pembenahan sistem birokrasi. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini

dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.

7. Misi ketujuh; Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara

Berwisata di era sekarang ini telah menjadi kebutuhan semua orang, terutama bagi orang-orang yang memiliki kesibukan dan butuh berlibur. Kabupaten Boven Digoel sedang mengembangkan potensi wisata melalui pelestarian budaya. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman seni dan budaya, pemerintah Boven Digoel dituntut melakukan berbagai upaya guna memperkuat pelestarian seni budaya yang berorientasi pada edukasi dan hiburan. Hingga kini, potensi keanekaragaman budaya khususnya kesenian belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik atau atraksi wisata budaya.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya. Pemerintah bersama pihak-pihak yang berkepentingan harus mampu menjadikan pariwisata budaya sebagai alat, untuk mendayagunakan sekaligus melestarikan keanekaragaman potensi dan keunikan sumber daya di Indonesia yang salah satunya adalah keanekaragaman seni dan budaya.

8. Misi kedelapan; Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan

Semua daerah harus berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah,

Kabupaten Boven Digoel mencoba untuk mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata sebagai sumber-sumber penerimaan daerahnya. Walaupun Kabuapten Boven Digoel masih tergantung dengan dana dari pemerintah pusat dan hibah, Namun, Kabupaten Boven Digoel berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui bidang-bidang pembangunan lainnya.

9. Misi kesembilan; Pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar

Kabupaten Boven Digoel menyimpan segudang potensi alam yang menjadi andalan masa depan bangsa Indonesia dan Provinsi Papua. Potensi itulah yang akan menyejahterakan masyarakat yang juga dimiliki hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota lainnya di Papua. Di antaranya letak wilayah yang sangat strategis di atas alur kandungan logam mulia. Selain emas, diperkirakan ada pula nikel, bijih besi, dan batu bara yang terpendam di wilayah kabupaten itu. Pemanfaatan tanah di Boven Digoel oleh masyarakat diantaranya untuk sektor perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan, seperti karet, kopi, coklat, vanili, dan jambu mete.

Tampaknya, sektor itu dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Komoditas unggulan itu dikembangkan di hampir semua distrik dengan komoditas berbeda-beda. Selain memiliki potensi lahan, sesungguhnya Kabupaten Boven Digoel juga memiliki potensi hutan yang luas. Diharapkan dengan berbagai potensi yang ada, Kabupaten Boven Digoel dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga unggul dengan daerah lainnya.

Daripenjabaran visi dan misi di atas, misi kesembilan yaitu **Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam yang Memiliki Unggulan Komparatif Lintas Pasar**, merupakan misi yang secara langsung terkait dan sebagai amanat untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah karena di dalam misi tersebut menyangkut tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan laju pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2021 menjadi 7,40 persen menjadi salah satu amanat dan tanggungjawab dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, untuk memberikan kontribusi yang signifikan melalui peningkatan jumlah koperasi dan UKM yang ada di Boven Digoel. Peningkatan jumlah koperasi dan UKM di Boven Digoel diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven Digoel menjadi 7,40 persen pada akhir tahun 2021.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Papua

Kementerian Koperasi dan UKM adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan **Visi**, yaitu:

**" Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan
Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai
Soko Guru Perekonomian Nasional"**

a. Misi Kementerian Koperasi dan UKM

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu :

**"Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan
UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai
Soko Guru Perekonomian Nasional"**

Untuk mencapai visi diatas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

- Mengimplementasikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik)
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan KUMKM
- Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi

b. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional,
2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM KUMKM.

3. Peningkatan daya saing produk KUMKM melalui meningkatkan kemampuan KUMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk KUMKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk.
5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada KUMKM.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.

2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM.

Khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam upaya memacu pemberdayaan Koperasi UMKM di Tanah Merah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua telah menetapkan **Visi** yaitu :

**“Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya saing “**

Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sehat kelembagaan dan usaha, memiliki kualitas pengelolaan, administrasi dan permodalan serta memiliki kemandirian yang berperan sebagai motor penggerak dalam perekonomian daerah maupun nasional .

Diharapkan di Daerah tumbuh dan berkembang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sehat, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu

menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.

Misi dan Tujuan

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan harus ditunjang dengan Misi yang jelas dan terukur guna mempermudah pencapaian tujuan, sasaran yang ingin dicapai.

Rumusan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan Keterpaduan Program Dan Kegiatan Serta Ketatausahaan Pembinaan Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Yang Berkualitas

Tujuan :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang terkoordinasi dan bermutu
- 2) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
- 3) Peningkatan kontinuitas pengelolaan dan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik daerah
- 4) Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran

Misi 2 :

Mendorong Pertumbuhan Dan Kemandirian Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global

Tujuan :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing
- 2) Peningkatan aksesibilitas jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan
- 3) Peningkatan kualitas koperasi melalui koordinasi dan konsultasi antar sektor dalam pemberdayaan koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi

Misi 3 :

Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dukungan Pembiayaan Dan Permodalan, Pengembangan Akses Pasar, Promosi Dan Legalitas Formal UMKM , Serta Penciptaan Wirausaha Baru

Tujuan :

- 1) Peningkatan efektifitas pemberdayaan UMKM dibidang pemasaran dan jaringan usaha melalui diklat dan penelitian UMKM, promosi dan pameran serta kegiatan pasar rakyat bagi UMKM.
- 2) Peningkatan legalitas UMKM melalui fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha, penyediaan sarana dan prasarana usaha, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM
- 3) Peningkatan produktifitas UMKM melalui pembinaan produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender.

Misi 4 :

Meningkatkan Kemampuan Koperasi Dan UMKM Melalui Fasilitasi Permodalan Dan Pembinaan Simpan Pinjam Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global

Tujuan :

- 1) Peningkatan efektivitas fasilitasi akses pembiayaan melalui kemudahan dan penguatan permodalan, pengembangan lembaga keuangan, pengembangan jaringan usaha dan kemitraan KSP/USP serta penumbuhan iklim usaha dalam aspek pendanaan
- 2) Penciptaan stabilitas iklim usaha KSP/USP yang sehat melalui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, dan permodalan, pemberian konsultasi KSP/USP sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi.
- 3) Peningkatan akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP melalui penertiban legalitas dan administrasi KSP/USP

Misi 5 :

Meningkatkan Kesadaran Dan Kemauan Serta Pemahaman Masyarakat Dalam Mengembangkan Usahanya Melalui Koperasi Dan UMKM

Tujuan :

- 1) Peningkatan kapasitas pembinaan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
- 2) Peningkatan kapasitas pembinaan UMKM melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- 3) Peningkatan efektivitas koordinasi dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.

Misi 6 :

Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Dan Pengelola Koperasi Dan UMKM Melalui Kegiatan Diklat

Tujuan :

- 1) Peningkatan efektivitas kegiatan diklat melalui perencanaan dan indentifikasi kebutuhan Diklat KUMKM
- 2) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur dan pengelola KUMKM
- 3) Peningkatan efektivitas kegiatan diklat melalui monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan Diklat KUMKM

Dengan memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh KUMKM di Provinsi Papua, maka pemberdayaan KUMKM perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas Manajemen pengelolaan, kualitas permodalan, kualitas pelayanan bagi anggota dan masyarakat.

Agar memiliki kemandirian dan daya saing dalam menghadapi pasar global sekaligus berkontribusi langsung terhadap pembangunan Daerah maupun Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, namun masih terbuka berbagai peluang usaha baru bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, harus didukung kemauan politik yang kuat dari Pemerintah serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar guna menciptakan pembangunan yang semakin berkeadilan dan transparan serta menciptakan lebih banyak peluang baru untuk pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah dirumuskan di atas, agar lebih konkrit akan dijabarkan lebih detail pada pernyataan tujuan seperti yang tertuang pada tujuan masing-masing misi diatas serta sasaran dan kegiatan-kegiatan strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang berkualitas
- 2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- 3) Terwujudnya kontinuitas pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik daerah
- 4) Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
- 5) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing
- 6) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan
- 7) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi
- 8) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha
- 9) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha yang memadai.
- 10) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender.
- 11) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan , permodalan, jaringan usaha dan kemitraan.
- 12) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang sehat , SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi.
- 13) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan administrasi KSP/USP yang berkualitas.
- 14) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
- 15) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik

- 16) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM
- 17) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM
- 18) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional.
- 19) Termonitor dan terevaluasinya efektivitas kegiatan KUMKM pasca diklat.

Strategi dan Kebijakan

Strategi

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk strategi dan kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Papua pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi dan konsultasi program/kegiatan dengan bidang teknis maupun instansi terkait (Tim TAPD)
2. Konsolidasi, konsultasi dan inventarisasi administrasi pengelolaan keuangan internal dan instansi terkait (Biro Keuangan dan Inspektorat)
3. Konsolidasi, konsultasi dan inventarisasi administrasi ketatalaksanaan kepegawaian dan BMD secara internal dan instansi terkait (Biro Umum, Biro Keuangan, BIKD dan Inspektorat)
4. Inventarisasi kebutuhan layanan publik
5. Konsolidasi, Konsultasi dan sosialisasi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi
6. Sosialisasi dan negosiasi perluasan jaringan usaha koperasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi koperasi
7. Konsolidasi dan konsultasi kegiatan antar sektor di bidang manajemen, permodalan dan administrasi dalam pemberdayaan Koperasi
8. Sosialisasi, koordinasi dan promosi UMKM di bidang pemasaran dan jaringan usaha serta konsolidasi dan fasilitasi diklat/bintek/penelitian, promosi/pameran dan pasar rakyat
9. Sosialisasi, konsultasi, koordinasi dan fasilitasi legal aspek; inventarisasi dan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana UMKM dan Wirausaha Baru.
10. Sosialisasi dan bintek dibidang produksi dan pengolahan, peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha Baru. Serta pemberdayaan kelompok ekonomis produktif dan UMKM responsif gender

11. Sosialisasi, konsultasi dan konsolidasi penguatan akses terhadap pembiayaan, permodalan, jaringan usaha dan kemitraan.
12. Konsolidasi, koordinasi dan konsultasi penciptaan iklim usaha KSP/USP yang kondusif dengan berbagai sektor terkait sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi
13. Intensifikasi dan koordinasi penilaian kesehatan KSP/USP
14. Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang perkoperasian serta publikasi informasi koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
15. Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang UMKM serta publikasi informasi koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
16. Konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM
17. Inventarisasi dan konsolidasi data perencanaan dan identifikasi kebutuhan diklat KUMKM
18. Koordinasi dan konsultasi peningkatan profesionalisme SDM Aparatur dan pengelola KUMKM
19. Koordinasi, konsultasi dan konsolidasi kegiatan KUMKM Pasca Diklat.

Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam melaksanakan strategi tersebut di atas sbb :

1. Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2005-2025 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif
- f. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
- g. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM
- h. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
- i. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Dengan memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh KUMKM di Provinsi Papua, maka pemberdayaan KUMKM perlu ditingkatkan kualitas Manajemen pengelolaan, kualitas permodalan, kualitas pelayanan bagi anggota dan masyarakat agar memiliki kemandirian dan daya saing dalam menghadapi pasar global sekaligus berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah maupun nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, namun masih terbuka berbagai peluang usaha baru bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, harus didukung kemauan politik yang kuat dari Pemerintah serta komitmen membangun sistem ekonomi yang lebih demokratis berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada mekanisme pasar guna menciptakan pembangunan yang semakin berkeadilan dan transparan serta menciptakan lebih banyak peluang baru untuk pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan dan tantangan yang dihadapkan pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor sumberdaya manusia, manajemen usaha, keterbatasan akses pada jaringan dan peluang kerjasama, serta masih adanya kepentingan pribadi yang memanfaatkan keberadaan koperasi.

Dari sisi faktor ekonomi, karena adanya keterbatasan akses terhadap modal secara tidak langsung membawa dampak terhadap sulitnya memperoleh bahan baku dan terhambatnya proses pemasaran. Dari sisi pembentukan badan hukum koperasi animo masyarakat untuk pengesahan badan hukum koperasi cukup tinggi. Prosedur pengesahan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan badan hukum masih sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku yaitu rata-rata sebelum 3 bulan rata-rata tanda terima diberikan pada calon koperasi yang akan menerima badan hukum, maka surat keputusan sudah diterbitkan dengan memenuhi ketentuan berlaku.

Berdasarkan PerMen KUMKM nomor 19 Th 2008, yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan KSP/USP, mungkin sedikit mempersulit prakoperasi untuk memperoleh legalitas badan hukum karena persyaratan modal yang disetor minimal mencapai 15 juta rupiah bagi koperasi primer sehingga terasa berat bagi calon pengurus yang tidak mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk itu. Dari sisi internal Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Boven Digoel.

Terbatasnya SDM terhadap pemahaman dan keterampilan dibidang masing-masing yang membutuhkan keahlian khusus diantaranya petugas penyuluh koperasi.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembinaan koperasi terutama bagi koperasi baru. Disamping itu adanya mutasi pegawai antar OPD menjadi salah satu sebab pengkaderan menjadi terbatas.

Kerjasama antar lintas sektoral sangat diperlukan terutama bagi OPD yang saling berkaitan, selama ini kerjasama belum optimal sehingga pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis dan manajemen usaha masih kurang.

Akses permodalan sangat sulit didapat oleh pelaku KUMKM pemula dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan lembaga keuangan atau pemerintah sebagai pemilik modal menerapkan aturan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pinjaman modal harus memiliki agunan, sedangkan bagi KUMKM pemula umumnya belum memiliki asset yang dapat dijadikan agunan.